



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.84, 2020

KEMENPERIN. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian. Gubernur. Wakil Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan Dekonsentrasi TA 2020.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN  
YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH  
PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN  
2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lingkup Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Dilimpahkan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
  11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN YANG DILIMPALKAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Menteri Perindustrian melimpahkan lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020.
- (2) Lingkup sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi sebagian Program

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, dan Aneka.

#### Pasal 2

Sebagian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Pembinaan teknis atas kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka.

#### Pasal 5

Rincian anggaran kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 2 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 LINGKUP SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG  
 PERINDUSTRIAN YANG DILIMPALKAN KEPADA GUBERNUR  
 SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM  
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN  
 2020

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
 INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA

<b>NO.</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
1.	Gubernur Aceh	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.842.180.000,00
2.	Gubernur Sumatera Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp3.360.564.000,00

3.	Gubernur Sumatera Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.697.124.000,00
4.	Gubernur Riau	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.114.800.000,00
5.	Gubernur Riau Kepulauan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.921.844.000,00
6.	Gubernur Bengkulu	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.054.880.000,00
7.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.459.020.000,00
8.	Gubernur Jambi	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.903.840.000,00
9.	Gubernur Sumatera Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.139.840.000,00

10.	Gubernur Lampung	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.126.724.000,00
11.	Gubernur DKI Jakarta	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.262.720.000,00
12.	Gubernur Banten	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.155.620.000,00
13.	Gubernur Jawa Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.991.828.000,00
14.	Gubernur Jawa Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.972.224.000,00
15.	Gubernur D.I. Yogyakarta	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.288.224.000,00
16.	Gubernur Jawa Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp3.613.144.000,00



17.	Gubernur Bali	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.206.892.000,00
18.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.406.816.000,00
19.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.470.336.000,00
20.	Gubernur Gorontalo	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.156.052.000,00
21.	Gubernur Kalimantan Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.325.236.000,00
22.	Gubernur Kalimantan Tengah	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.029.848.000,00
23.	Gubernur Kalimantan Selatan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.473.248.000,00

24.	Gubernur Timur	Kalimantan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.898.248.000,00
25.	Gubernur Utara	Kalimantan	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.401.828.000,00
26.	Gubernur Sulawesi Barat		Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.310.296.000,00
27.	Gubernur Sulawesi Utara		Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.446.232.000,00
28.	Gubernur Tengah	Sulawesi	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.023.796.000,00
29.	Gubernur Selatan	Sulawesi	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp2.771.740.000,00
30.	Gubernur Tenggara	Sulawesi	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.825.676.000,00

31.	Gubernur Maluku	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.811.492.000,00
32.	Gubernur Maluku Utara	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.577.608.000,00
33.	Gubernur Papua	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.745.948.000,00
34.	Gubernur Papua Barat	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	Rp1.614.132.000,00

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASAMITA